

DIGITALISASI DATA PENDIDIKAN SEBAGAI UPAYA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI DI DINAS PENDIDIKAN KOTA MOJOKERTO

Sri Astutik¹, Dida Rahmadanik²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

asstutik2021@gmail.com, didarahma@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Artikel pengabdian magang ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan digitalisasi data pendidikan sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Selama pelaksanaan magang yang berlangsung selama 40 hari kerja, mahasiswa berperan aktif dalam kegiatan administrasi, khususnya pendataan dan penginputan data peserta pada sistem SIPD-RI (Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia) Sub Kegiatan Belanja. Sistem ini menjadi instrumen digital yang membantu proses pengelolaan anggaran, kegiatan, dan pelaporan secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui keterlibatan langsung dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman praktis mengenai tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta memahami pentingnya inovasi digital dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa implementasi SIPD-RI mampu memperkuat prinsip *Good Governance* melalui transparansi data, efisiensi waktu, serta peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi. Dengan demikian, digitalisasi data pendidikan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Digitalisasi data, reformasi birokrasi, SIPD-RI , good governance.

ABSTRACT

This internship service article aims to describe the implementation of educational data digitalization as an effort to support bureaucratic reform at the Department of Education and Culture of Mojokerto City. During the 40-working-day internship, the student was actively involved in administrative activities, particularly in recording and inputting participant data into the SIPD-RI (Regional Government Information System of the Republic of Indonesia) under the Expenditure Sub-Activity. This system serves as a digital instrument that facilitates more efficient, transparent, and accountable management of budgets, activities, and reporting. Through direct involvement, the student gained practical experience in understanding technology-based governance and the importance of digital innovation in improving public service quality. The results show that the implementation of SIPD-RI strengthens Good Governance principles through data transparency, time efficiency, and enhanced bureaucratic accountability. Therefore, educational data digitalization is a strategic step toward realizing a modern and responsive local government.

Keywords: Data digitalization, bureaucratic reform, SIPD-RI, good governance.

PENDAHULUAN

Dinas Pendidikan Kota Mojokerto sebagai salah satu instansi pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola data pendidikan yang kompleks dan terus berkembang. Data tersebut meliputi data guru, siswa, sarana-prasarana, serta berbagai program pendidikan yang dijalankan. Selama ini, pengelolaan data secara manual sering kali menimbulkan kendala, seperti keterlambatan pelaporan, duplikasi data, hingga sulitnya melakukan analisis kebijakan yang akurat. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan data yang lebih modern melalui digitalisasi. Keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kepemimpinan transformasional, kesiapan infrastruktur teknologi, dan adaptasi budaya organisasi, sementara tantangan utama meliputi kesenjangan literasi digital tenaga pendidik, keterbatasan anggaran, dan resistensi budaya terhadap perubahan teknologi.(Afra et al., 2025)

Implementasi digitalisasi data pendidikan juga memberikan manfaat besar bagi tenaga pendidik dan satuan pendidikan. Melalui sistem terintegrasi, sekolah dapat dengan mudah memperbarui data, mengirim laporan, serta memantau perkembangan peserta didik secara real-time. Di sisi lain, Dinas Pendidikan dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara lebih objektif berdasarkan data aktual yang tersimpan dalam sistem. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang menekankan pada peningkatan kualitas layanan publik dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Langkah ini melibatkan penggantian atau penambahan perangkat seperti komputer dan server guna meningkatkan efisiensi sistem manajemen pendidikan.Untuk mendukung pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), program pelatihan berkala bagi operator sekolah dan staf administrasi telah dijalankan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola teknologi pendidikan(Azzahra, 2024)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat vital dalam melakukan pengelolaan data pendidikan yang modern dengan memanfaatkan sistem seperti SIPD-RI yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Sistem ini menjadi alat utama dalam pengaturan data tentang anggaran, kegiatan, dan pelaporan secara terpadu dan terbuka. Kegiatan magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto merupakan bagian dari upaya akademik untuk memahami dan memberikan kontribusi dalam proses digitalisasi tersebut. Persiapan untuk magang dimulai dengan melakukan survei ke lembaga terkait untuk memastikan adanya slot magang dan kesesuaian bidang dengan program studi. Proses administrasi dilanjutkan dengan pengajuan proposal serta rekomendasi resmi melalui Bakesbangpol Kota Mojokerto, sebagai bagian dari koordinasi antar lembaga yang sesuai dengan prosedur pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya

pengelolaan administratif yang baik sebelum kegiatan dilaksanakan, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang menekankan pada keteraturan dan transparansi dalam prosedur.

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan magang yang berlangsung selama 40 hari kerja memberikan pengalaman langsung dalam berbagai bidang administrasi pendidikan, termasuk pengarsipan dokumen, pendataan, dan penginputan data melalui sistem SIPD-RI. Kegiatan tersebut menjadi wujud nyata penerapan digitalisasi data pendidikan, di mana mahasiswa belajar mengelola arsip secara digital, memahami alur input data belanja kegiatan, serta berkontribusi dalam mendukung transparansi informasi keuangan daerah. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan seperti seminar dan bimbingan teknis guru menunjukkan peran Disdikbud dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui program berbasis data dan teknologi. Khususnya pada perencanaan anggaran daerah serta melibatkan semua orang dengan memanfaatan teknologi digital menjadi harapan Pemerintah Daerah masa kini dan masa depan(Tumija & Erlambang, 2023)

Tahap penulisan hasil magang mencerminkan keseluruhan pengalaman. Sebagai bentuk tanggung jawab akademis, mahasiswa membuat laporan, publikasi ilmiah, dan rekaman video. Hasil ini menunjukkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya digitalisasi data sebagai komponen perubahan birokrasi, di samping mencerminkan kegiatan magang. Bersama dengan dosen pembimbing, fase pendampingan magang bertindak sebagai instrumen akademis untuk meningkatkan hasil dan memastikan bahwa teori dan praktik selaras. Secara keseluruhan, magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto menawarkan contoh spesifik tentang bagaimana digitalisasi data pendidikan dapat membantu transformasi birokrasi.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis di lingkungan pemerintahan, tetapi juga berkontribusi dalam upaya peningkatan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan. Dengan demikian, magang ini menjadi wahana pembelajaran yang relevan dengan tuntutan era digital dan arah kebijakan reformasi birokrasi nasional. Melihat begitu kompleksnya permasalahan reformasi birokrasi pendidikan dan kebijakan kemendikbud terhadap mutu pendidikan, penting untuk segera dilakukan reformasi birokrasi pendidikan secara sungguh-sungguh melalui: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kewenangan daerah untuk mengelola urusan pendidikan, dan memberikan kesempatan masing-masing satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri.(Huges & Murjani, 2022).

Dengan demikian, digitalisasi data pendidikan bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi merupakan langkah strategis dalam mempercepat terwujudnya birokrasi yang bersih,

transparan, dan berorientasi pelayanan. Pemerintah Indonesia menciptakan sistem informasi yang merupakan salah satu wujud dari penerapan Satu Data Indonesia yang terdapat pada Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua dari Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta dipertegas pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang merupakan tujuan Pemerintah Daerah dalam mencapai good governance. Melalui penerapan sistem digital yang efektif, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi berbasis digital. Penelitian atau kajian ini penting untuk melihat sejauh mana digitalisasi data berkontribusi terhadap peningkatan kinerja birokrasi serta pelayanan pendidikan di tingkat daerah. Optimalisasi kearsipan surat dinas merupakan upaya strategis dalam meningkatkan akuntabilitas layanan administrasi di lingkungan pemerintahan.

METODE PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Mojokerto yang berlangsung selama 40 hari kerja (14 Juli - 5 September 2025), penulis berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan optimalisasi kearsipan surat dinas sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas layanan administrasi. Kegiatan diawali dengan pembekalan pada minggu pertama untuk memahami struktur organisasi, fungsi dinas, serta kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Pada minggu ketiga dan keenam, penulis secara spesifik ditempatkan di bagian tata usaha dan administrasi umum dengan tanggung jawab utama membantu proses pengarsipan surat masuk dan surat keluar, yang meliputi pencatatan, pengelompokan dokumen berdasarkan klasifikasi, pengecekan, serta penyimpanan berkas secara manual dan digital untuk mendukung tertib administrasi. Selain tugas kearsipan, penulis juga terlibat dalam pendataan dan penginputan nama peserta pada sistem digital SIPD-RI Sub Kegiatan Belanja pada minggu keempat, serta menjadi notulen dalam kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi GTK pada minggu kelima. Pada tahap akhir, penulis menyusun luaran magang berupa laporan akhir, artikel ilmiah, dan video dokumentasi, yang berisi analisis, refleksi, dan rekomendasi terhadap seluruh kegiatan, termasuk praktik pengelolaan arsip surat dinas, untuk mewujudkan layanan administrasi yang lebih tertib, efisien, dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto memberikan pengalaman langsung dalam penerapan sistem digital pemerintahan, khususnya melalui penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). SIPD-RI merupakan platform digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan daerah secara nasional. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sebuah inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang diatur dengan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang berlaku sejak 27 September 2019. SIPD berfungsi sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini dapat digunakan untuk mendukung integritas pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.

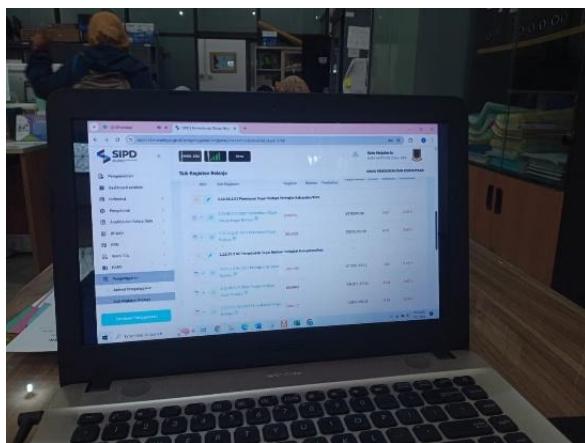
Sistem ini menjadi bagian penting dalam upaya reformasi birokrasi, karena mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan publik di setiap instansi pemerintah daerah. Dengan adanya sistem ini, kegiatan operasional dan administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara elektronik dan terpusat. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan selama magang adalah pendataan dan penginputan nama peserta pada Sub Kegiatan Belanja dalam sistem SIPD-RI. Kegiatan ini mencakup proses administrasi dan pengelolaan data peserta kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah, seperti kegiatan pelatihan, seminar, maupun bimbingan teknis bagi guru dan tenaga kependidikan. Mahasiswa berperan dalam membantu staf Disdikbud untuk melakukan entri data peserta, meliputi nama lengkap, NIP, jabatan, unit kerja, dan keikutsertaan kegiatan. Proses input ini dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa seluruh peserta yang terlibat dalam kegiatan tersebut tercatat secara benar dan lengkap dalam sistem SIPD-RI sesuai dengan dokumen pendukung yang telah diverifikasi.



Gambar 1 Melakukan Input Data

Kegiatan pendataan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian integral dari penerapan digitalisasi data pendidikan di lingkungan pemerintah daerah. Melalui sistem SIPD-RI, seluruh data peserta kegiatan tersimpan secara digital, mudah diakses, dan dapat diperbarui sewaktu-waktu. Hal ini membantu meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektivitas kerja aparatur dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan, terutama yang berkaitan dengan realisasi anggaran belanja. Selain itu, digitalisasi data juga mendukung proses monitoring dan evaluasi program pendidikan, karena data peserta dapat diolah menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang.

Dari sisi penerapan prinsip *Good Governance*, kegiatan pendataan dan penginputan data peserta pada SIPD-RI menunjukkan penerapan nilai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Transparansi tercermin dari keterbukaan data dan akses yang dapat diaudit oleh pihak berwenang kapan saja. Akuntabilitas tampak dari adanya bukti digital yang dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap tahapan administrasi, mulai dari pendataan hingga pelaporan kegiatan. Sementara itu, efisiensi tercapai melalui penggunaan sistem digital yang mempercepat proses entri data dan mengurangi risiko kesalahan input serta duplikasi dokumen. Dengan demikian, SIPD-RI berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan dan peningkatan kinerja birokrasi.



Gambar 2 Tampilan SIPD - RI

Lebih jauh, implementasi SIPD-RI juga mendukung terciptanya sinkronisasi data antarbidang di lingkungan Dinas Pendidikan, karena sistem ini mengintegrasikan berbagai sub kegiatan dalam satu platform. Hal ini sangat membantu dalam penyusunan laporan keuangan dan realisasi anggaran yang lebih akurat. Bagi mahasiswa, keterlibatan langsung dalam proses digitalisasi ini memberikan wawasan praktis tentang bagaimana sistem pemerintahan modern dijalankan dan bagaimana teknologi informasi digunakan untuk mendukung tata kelola publik yang lebih baik. Pengalaman ini menjadi bukti konkret bahwa penerapan teknologi informasi bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga langkah strategis menuju birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain itu, implementasi SIPD-RI dalam proses pendataan peserta kegiatan juga mendorong terciptanya alur kerja yang lebih sistematis di lingkungan Dinas Pendidikan. Setiap data yang diinput melalui sistem dapat terverifikasi dengan lebih cepat karena adanya standar format dan prosedur yang seragam. Hal ini meminimalkan potensi duplikasi, kesalahan pencatatan, serta mempercepat proses monitoring oleh pejabat terkait. Pemanfaatan sistem ini juga membantu memastikan bahwa setiap kegiatan belanja memiliki dasar data yang jelas dan terdokumentasi, sehingga mempermudah proses audit internal maupun eksternal. Dengan adanya peningkatan kualitas tata kelola data ini, instansi dapat menjalankan fungsi administrasinya secara lebih konsisten dan terukur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan pendataan dan penginputan data peserta pada sistem SIPD-RI Sub Kegiatan Belanja tidak hanya memberikan manfaat administratif, tetapi juga memperkuat penerapan reformasi birokrasi di sektor pendidikan daerah. Melalui sistem ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto mampu mengelola data dan anggaran secara lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Proses digitalisasi

ini juga menjadi contoh nyata transformasi birokrasi menuju *e-government*, di mana layanan publik berbasis data digital menjadi pondasi dalam membangun pemerintahan yang adaptif, efektif, dan terpercaya di era digital saat ini.

Pelaksanaan magang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana proses digitalisasi data pendidikan dapat mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan pendataan dan penginputan data peserta pada Sub Kegiatan Belanja di sistem SIPD-RI, mahasiswa memperoleh pengalaman langsung dalam penerapan sistem digital pemerintahan yang menekankan ketertiban administrasi, transparansi informasi, dan efisiensi kerja. Sistem SIPD-RI berperan penting sebagai wadah terintegrasi yang menghubungkan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih sistematis dan akuntabel.

Selain itu, penggunaan SIPD-RI terbukti mampu mempercepat proses administrasi dan mengurangi potensi kesalahan input data yang sering terjadi dalam sistem manual. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukan hanya sekadar perubahan teknis, tetapi merupakan transformasi strategis dalam cara kerja birokrasi. Melalui sistem digital, seluruh aktivitas administrasi dapat dipantau secara *real-time*, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan efektivitas penggunaan anggaran daerah. Penerapan sistem ini juga mendorong transparansi publik karena data dapat diakses dan diaudit secara terbuka oleh pihak berwenang, sejalan dengan prinsip *Good Governance*.

Dari sisi pembelajaran, kegiatan magang ini memperkaya wawasan mahasiswa mengenai praktik tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi. Mahasiswa tidak hanya memahami teori digitalisasi data dan reformasi birokrasi, tetapi juga mempraktikkan langsung proses pengelolaan arsip, pendataan peserta kegiatan, serta pelaporan digital melalui SIPD-RI. Pengalaman ini menjadi bekal penting untuk menghadapi dunia kerja, terutama di era pemerintahan digital yang menuntut kemampuan adaptif terhadap sistem informasi dan manajemen data yang efisien. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memperlihatkan bahwa integrasi teknologi dalam pengelolaan data pendidikan mampu menciptakan birokrasi yang lebih terbuka, cepat, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem SIPD-RI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto disarankan untuk terus melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis secara rutin bagi pegawai dan operator sekolah. Hal ini penting agar seluruh aparatur memahami mekanisme sistem, mampu melakukan pembaruan data dengan benar, dan dapat menyelesaikan kendala teknis secara mandiri. Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, serta sistem keamanan data juga perlu menjadi prioritas agar proses digitalisasi dapat berjalan optimal tanpa hambatan teknis.

Pemerintah daerah juga perlu memperluas kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan instansi terkait dalam pengembangan inovasi teknologi pendidikan. Kolaborasi tersebut dapat menciptakan solusi baru berbasis riset dan teknologi untuk memperkuat sistem informasi daerah, termasuk dalam pengelolaan data pendidikan yang akurat dan terintegrasi. Lebih lanjut, budaya kerja digital perlu ditanamkan di seluruh lapisan organisasi agar setiap pegawai memiliki kesadaran pentingnya akurasi data, efisiensi kerja, dan keterbukaan informasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dapat menjadi contoh penerapan reformasi birokrasi berbasis digital yang efektif, profesional, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi *Satu Data Indonesia* dan prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Afra, M., Mahdalena, & Alwi, S. (2025). Digitalisasi Layanan Pendidikan Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Madrasah : Sebuah Tinjauan Literatur. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*.
- Azzahra, A. (2024). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Data Siswa: Studi Kasus SMK Kabupaten Kampar. *Al-Marsus : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 142–153. <https://doi.org/10.30983/al-marsus.v2i2.9098>
- Huges, & Murjani. (2022). Strategi Reformasi Birokrasi Pendidikan Dan Kebijakan Kemendikbud. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi*, 155–169. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.36>